

IMPLEMENTASI E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP UMKM DI KOTA BATU (Studi Pada Kantor CV. Bias Cipta Estetika di Kota Batu)

Mohammad Dava Nugroho¹, Khoiron², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: MdavaN123@gmail.com*

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta pemberdayaan UMKM melalui e-procurement yang diatur dalam Perpres No. 54/2010 dan No. 16/2018, termasuk di Kota Batu yang memiliki 14.000 UMKM. Meski anggaran pengadaan bagi UMKM mencapai Rp279,2 miliar pada 2023, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme e-katalog. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Batu melakukan sosialisasi, pendampingan, serta mendorong inovasi produk agar UMKM lebih kompetitif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan teori implementasi kebijakan Grindle untuk menyelidiki penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Batu khususnya di CV. Bias Cipta Estetika melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-katalog meningkatkan akses pasar, efisiensi, dan transparansi UMKM, namun masih mengalami kendala dalam hal kompleksitas administrasi, literasi digital, dan adaptasi teknologi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, LKPP, penyedia jasa, dan UMKM, serta dukungan institusional yang kuat. Oleh karena itu, optimalisasi e-katalog memerlukan strategi pendampingan yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penyederhanaan prosedur agar semakin efektif dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Batu.

Kata Kunci : UMKM, Implementasi, e-katalog, Pengadaan

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat, baik dari segi aset berwujud maupun tidak berwujud. Tata kelola menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Tata kelola menjadi semakin penting jika pengadaan barang atau jasa memenuhi persyaratan tersebut. Salah satu aspek penting tata kelola adalah permintaan barang dan jasa (Suryono, 2022: 66). Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada perolehan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian, Lembaga, dan Badan Usaha Milik Daerah. Ada sejumlah gagasan mendasar yang menjadi pedoman tentang bagaimana gagasan tersebut harus diterapkan saat pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, transparan, kompetitif, adil, atau bebas dari diskriminasi, dan bertanggung jawab. Pencarian kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan langkah awal dalam proses pencatatan, yang terus berlanjut hingga semua kegiatan yang terkait dengan pembelian barang atau jasa selesai dilaksanakan dengan

menggunakan dana APBN/APBD (Mawarni, 2020: 81).

Pembelian produk dan layanan oleh pemerintah sangat penting untuk kemajuan. Upaya ini sangat terkait dengan pembangunan Indonesia dari sejumlah sudut pandang. Pembelian produk dan layanan oleh pemerintah dalam perekonomian menghasilkan fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik, yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Pembelian produk dan layanan oleh pemerintah untuk meningkatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu penyelesaian beberapa masalah sosial. Tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi semakin penting sebagai akibat dari ekspansi ekonomi Indonesia yang cepat dan perluasan otonomi daerah. Mandat pemerintah dapat bersifat khusus atau umum. Proses pengadaan barang dan jasa adalah cara permintaan ini diekspresikan.

Bahasa Indonesia: Untuk menjamin terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cepat, akurat, transparan, dan efisien serta mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa telah berkembang pesat sejak beralihnya prosedur lelang tradisional atau non-e-tendering ke e-procurement pada tahun 2010. Dalam rangka menekan pengeluaran negara, prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah kini lebih terbuka dan efisien daripada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi seluruh tahapan, meliputi penganggaran dan perencanaan, serta penyiapan lelang, perkiraan harga, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, penetapan pemenang lelang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia sangat mempengaruhi keberhasilan dan produktivitas proses pengadaan. Pemilihan pemasok yang tepat membantu memastikan bahwa barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dapat dikirimkan tepat waktu. *E-buying* adalah kegiatan membeli produk dan jasa yang terstandarisasi dan dapat diakses secara luas di pasar. Menurut PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aplikasi *e-purchasing* mencakup *e-katalog*, yaitu sistem elektronik yang mencakup daftar, kategori, spesifikasi teknis, dan harga barang.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah mengatur lebih lanjut penggunaan *e-katalog* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik. Katalog elektronik, yang sering disebut sebagai *E-katalog*, adalah sistem informasi digital yang mencakup daftar, spesifikasi teknis, harga, dan klasifikasi barang dan jasa tertentu dari berbagai penyedia pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Untuk mengatur penggunaan e- Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pemerintah memberikan landasan hukum bagi pembelian barang dan jasa melalui *e-katalog*. *E-katalog* sendiri merupakan sistem digital berisi informasi harga, spesifikasi, dan klasifikasi komoditas dari berbagai penyedia dalam pengadaan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, fungsi, dan kemampuannya dalam mendorong pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi

di Kota Batu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 8, UMKM harus diberdayakan dan dikembangkan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, memberikan peluang berusaha, serta memberikan dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang seluas-luasnya kepada usaha tersebut.

Menurut dokumen, komitmen pemerintah dalam memajukan UMKM dan produk lokal dibuktikan dengan lebih dari 14.000 UMKM di Kota Batu yang wajib mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui Katalog Elektronik Daerah, Pemerintah Kota Batu telah mengembangkan program *E-katalog* yang disebut Pengadaan Barang dan Jasa Perbelanjaan. Menurut Dian Fachroni, Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batu, masih banyak pelaku UMKM di Kota Batu yang belum memahami secara mendalam tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didesak oleh Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai untuk mengurangi belanja langsung dan menggunakan *e-katalog* untuk pembelian produk dan layanan. Hal ini bertujuan untuk mendukung UMKM daerah dan menjamin peningkatan kualitas dan harga produk. Melalui program *E-katalog*, yang membantu UMKM untuk bergabung dengan *e-katalog*, Aries juga menyarankan untuk memasarkan barang-barang UMKM di hotel dan restoran untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap produk lokal. Selain itu, Pj Wali Kota Batu menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan *e-katalog* untuk membeli barang dan jasa. Membeli dari *e-katalog* mendukung UMKM daerah sambil memastikan kualitas dan harga produk. Untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap barang-barang daerah, Aries mendorong display produk UMKM di fasilitas penginapan dan tempat makan.

Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menegaskan, meski harga barang-barang UMKM terbilang terjangkau, kualitas dan tampilannya yang kurang menarik membuat barang-barang tersebut kurang diminati. Demi menarik minat konsumen, Aries menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan mutu produk. Selain itu, ia menghimbau setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Selain itu, melalui inisiatif *E-katalog* (malang-post.com), Aries menghimbau pelaku UMKM untuk lebih gencar melakukan pemasaran digital dan mengusulkan agar sentra-sentra UMKM didirikan sebagai hub

pemasaran dan pembinaan produk. Berdasarkan data awal yang diambil dari Peraturan BPK Kota Batu, terdapat sekitar 14.000 UMKM di Kota Batu. Untuk mendorong UMKM dan menunjukkan rasa cinta terhadap produk lokal, mereka semua harus ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun demikian, masih banyak UMKM di Kota Batu yang belum mengetahui prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal, total alokasi dana untuk UMKM pada tahun 2023 adalah sebesar Rp279,2 miliar. Sayangnya, karena *e-katalog* belum diterapkan untuk masyarakat umum, khususnya di Kota Batu, peneliti dapat mengambil tindakan dari titik ini.

Menurut laporan di Tugumalang, banyak OPD yang masih melakukan pembelian langsung, tetapi mereka didesak untuk memanfaatkan *e-katalog* untuk memperoleh barang dan jasa dalam upaya mendukung UMKM setempat dan menjamin produk yang lebih berkualitas dan lebih terjangkau. Singkatnya, sejumlah besar pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Kota Batu masih belum mengetahui adanya pembelian barang dan jasa dari pemerintah. Memang benar bahwa Kota Batu memiliki potensi yang cukup besar untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah Kota Batu tengah menyikapi masalah ini dengan menerapkan berbagai inisiatif baru dan menyelenggarakan berbagai acara sosialisasi. Diharapkan, semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menggunakan *e-katalog*. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong UMKM daerah dan meningkatkan jaminan kualitas dan harga produk. Untuk itu, Kebijakan *E-katalog* Barang dan Jasa UMKM di Kota Batu harus diimplementasikan secara menyeluruh guna menilai efektivitas dan efisiensinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan *E-katalog* dalam Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan teori Grindle Terhadap UMKM di Kota Batu?

Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Menurut Grindle (2017), penerapan kebijakan berarti:
"Implementation are made is when policies or programs are being initially defined. Both political and administrative actors are involved in the task of goal setting." (Grindle, 2017: 37)

Menurut gagasan tersebut di atas, implementasi adalah proses yang dimulai ketika suatu program atau kebijakan sedang dikembangkan

dengan melibatkan pelaku administratif dan politik untuk menetapkan tujuannya.

Grindle (2017) mengajukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup berbagai aspek seperti kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, kejelasan pelaksana program, serta sumber daya yang dialokasikan. Sebagai contoh, kebijakan yang berhasil biasanya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran secara eksplisit, memberikan manfaat yang relevan, dan menetapkan pelaksana program serta alokasi sumber daya yang memadai. Selain itu, kebijakan yang ambisius harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar tingkat perubahan yang diharapkan dapat tercapai tanpa menghadapi risiko kegagalan implementasi (Grindle, 2017:11).

Konsep Kebijakan Publik

Grindle (2017) mengajukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup berbagai aspek seperti kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, kejelasan pelaksana program, serta sumber daya yang dialokasikan. Sebagai contoh, kebijakan yang berhasil biasanya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran secara eksplisit, memberikan manfaat yang relevan, dan menetapkan pelaksana program serta alokasi sumber daya yang memadai. Selain itu, kebijakan yang ambisius harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar tingkat perubahan yang diharapkan dapat tercapai tanpa menghadapi risiko kegagalan implementasi (Grindle, 2017:11).

Konsep E-katalog

Katalog digital adalah sistem elektronik yang menyajikan informasi produk secara lengkap dan mudah diakses, dikelola oleh LKPP untuk pengadaan pemerintah. Sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021, terdapat tiga jenis katalog elektronik yang digunakan. Pertama, Katalog Elektronik Nasional yang dibuat dan dikelola oleh LKPP untuk kepentingan nasional. Kedua, Katalog Elektronik Sektorial yang dikelola oleh kementerian atau lembaga dengan fokus yang lebih sempit. Ketiga, Katalog Elektronik Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk barang rutin yang memenuhi kriteria tertentu.

Salah satu dari sekian banyak manfaat *e-katalog* adalah mengurangi biaya pencetakan, yang

membantu bisnis menghasilkan lebih banyak uang. Karena *e-katalog* dianggap lebih efisien daripada katalog cetak, semakin banyak bisnis yang beralih ke *e-katalog*. *E-katalog* juga memberi sejumlah keuntungan tambahan bagi bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena melalui data deskriptif non-numerik. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara komprehensif implementasi kebijakan yang dikaji berdasarkan perspektif para partisipan yang terlibat.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan *E-katalog* untuk pengadaan barang dan jasa oleh UMKM di Kota Batu. Evaluasi difokuskan pada dua elemen utama menurut Grindle (2017), yaitu konten kebijakan dan konteks implementasi. Konten kebijakan mencakup tujuan, manfaat yang diharapkan, perubahan yang diinginkan, dan sumber daya yang digunakan. Sementara itu, konteks eksekusi menekankan pentingnya pemangku kepentingan, lanskap kebijakan, dan elemen yang memengaruhi efektivitas implementasi.

Penelitian ini dilakukan di CV. Karya Cipta Estetika, Kota Batu, menggunakan data yang diambil dari dua sumber utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan UMKM dan staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *E-katalog*. Sementara itu, informasi sekunder diperoleh dari berkas internal, kebijakan pemerintah, ringkasan kegiatan, dan publikasi ilmiah terkait.

Pengamatan langsung, wawancara terbuka dan terorganisasi, serta dokumentasi merupakan beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup proses pengumpulan, penyaringan, penyajian, dan pengembangan kesimpulan yang kemudian diverifikasi untuk menjamin ketepatan temuan penelitian, digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan.

Keabsahan data dijaga dengan menerapkan berbagai teknik verifikasi, seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi metode dan sumber, analisis data negatif, serta member checking dengan narasumber. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat validitas dan keandalan yang tinggi, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pembahasan

Aspek Content of Policy (Isi Kebijakan)

Implementasi *E-katalog* pada sistem pengadaan barang dan jasa Kota Batu merupakan upaya besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), khususnya melalui CV. Bias Cipta Estetika. Pemerintah, sektor korporasi, dan organisasi UMKM merupakan beberapa pihak yang terlibat dalam program ini; masing-masing memiliki kepentingan dan permasalahan yang unik dalam hal penyesuaian sistem pengadaan digital ini. Menurut teori Grindle (2017), kompleksitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh jumlah pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam kasus ini, keberagaman kepentingan dari pemerintah, UMKM, dan sektor swasta memerlukan keseimbangan optimal agar tujuan utama kebijakan dapat tercapai dengan baik.

E-katalog memberikan beberapa manfaat utama bagi UMKM, termasuk perluasan akses pasar melalui proses pengadaan yang disederhanakan, peningkatan transparansi yang memastikan persaingan harga yang adil, sistem pembayaran yang lebih andal, dan peluang promosi yang lebih luas melampaui pasar lokal. Teori Grindle (2017) tentang *type of benefits* menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan. Dalam konteks *E-katalog* di Kota Batu, kebijakan ini menawarkan manfaat jangka pendek berupa kemudahan akses pasar dan kepastian pembayaran, namun tantangan jangka panjangnya adalah bagaimana UMKM dapat terus meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif dalam sistem ini.

Transformasi yang dibawa oleh *E-katalog* merepresentasikan perubahan substansial dalam ekosistem bisnis Kota Batu, beralih dari metode pengadaan tradisional dengan prosedur birokrasi yang kompleks ke sistem digital yang lebih efisien. Berdasarkan teori Grindle (2017) tentang *extent of change envisioned*, perubahan dalam implementasi *E-katalog* cenderung bersifat transformational karena mengubah secara menyeluruh mekanisme transaksi, regulasi, serta pola kerja pelaku usaha dan pemerintah daerah. Perubahan ini membawa efisiensi dan transparansi lebih tinggi, namun juga menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan prosedur administrasi yang lebih terstruktur, yang menjadi tantangan tersendiri bagi usaha kecil dengan keterbatasan literasi digital.

Struktur pengambilan keputusan untuk implementasi *E-katalog* mengikuti pendekatan yang didominasi *top-down*, dengan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui LKPP sementara pemerintah daerah menangani implementasi dan pengawasan. Berdasarkan teori Grindle (2017) mengenai *site of decision making*, pengambilan keputusan yang terpusat memberikan standar

nasional yang seragam namun sering kurang fleksibel untuk kondisi lokal. Kondisi ini tercermin dalam implementasi *E-katalog* di Kota Batu, di mana UMKM memiliki keterlibatan terbatas dalam perumusan kebijakan, mengakibatkan tantangan adaptasi dan kesulitan akses informasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pembuat kebijakan pusat dengan pelaksana di tingkat daerah.

Efektivitas implementasi program bergantung pada sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan lembaga pendukung. Teori Grindle (2017) menekankan bahwa kompetensi dan kapabilitas program implementer sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi *E-katalog* di Kota Batu, meskipun peran implementor telah ditetapkan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kejelasan tugas, koordinasi antarstakeholder, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang terlibat. UMKM melaporkan kesulitan mendapatkan dukungan teknis tepat waktu dan program pelatihan yang kurang konsisten, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pelaksana program agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Alokasi sumber daya untuk implementasi *E-katalog* mencakup aspek teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia. Grindle (2017) dalam teorinya mengenai *resources committed* menekankan bahwa tanpa alokasi sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Di Kota Batu, meskipun terdapat dukungan sumber daya yang cukup di CV. Bias Cipta Estetika, tantangan tetap ada dalam literasi digital di kalangan UMKM, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, dan prosedur administratif yang kompleks. Strategi peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penyederhanaan prosedur administrasi menjadi penting untuk memastikan keberhasilan implementasi *E-katalog* secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Secara keseluruhan, implementasi *E-katalog* di Kota Batu sejalan dengan kerangka teori Grindle dalam berbagai aspeknya. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta membuka akses lebih luas bagi UMKM, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keseimbangan kepentingan, distribusi manfaat yang merata, adaptasi terhadap perubahan, pengambilan keputusan yang inklusif, kapasitas implementor, dan alokasi sumber daya yang tepat.

Aspek Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Implementasi kebijakan *E-katalog* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Batu melibatkan

berbagai aktor dengan kepentingan dan strategi beragam. Sesuai teori Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan para aktor. Pemerintah berperan dalam regulasi dan pengawasan, LKPP bertanggung jawab mengelola sistem, penyedia jasa seperti CV. Bias Cipta Estetika mendukung operasional, dan UMKM sebagai pengguna utama berupaya meningkatkan akses pasar. Tantangan utama bagi UMKM adalah pemahaman teknis terbatas dalam menggunakan sistem, sehingga strategi sosialisasi, pelatihan rutin, dan evaluasi berkala menjadi penting untuk keberhasilan implementasi.

Karakteristik institusi dan rezim sangat mempengaruhi implementasi *E-katalog* di Kota Batu. Grindle menekankan bahwa lingkungan institusional dan dukungan politik berperan penting dalam keberhasilan kebijakan. Meskipun regulasi dinilai cukup jelas, UMKM menghadapi tantangan adaptasi terhadap persyaratan administratif yang ketat dan standar kualitas produk yang tinggi. Teori Grindle (2017) menyatakan kebijakan yang diterapkan dalam lingkungan birokrasi transparan dan didukung pemerintah stabil akan lebih mudah diimplementasikan. Di Kota Batu, dukungan pemerintah daerah cukup kuat namun masih memerlukan peningkatan dalam bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi yang lebih inklusif bagi UMKM.

Aspek kepatuhan (*compliance*) dan responsivitas (*responsiveness*) menjadi faktor penting dalam efektivitas kebijakan *E-katalog* di Kota Batu. Sesuai teori Grindle (2017), mekanisme evaluasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan baik. Hasil wawancara menunjukkan tingkat kepatuhan pegawai dan mitra terhadap kebijakan cukup tinggi berkat pengawasan ketat dari instansi terkait. Responsivitas juga positif dengan sebagian besar pegawai dan mitra mampu menyesuaikan diri meskipun membutuhkan waktu adaptasi. Namun, terdapat variasi pandangan tentang fleksibilitas kebijakan di mana beberapa UMKM merasa regulasi masih terlalu kaku. Grindle menekankan bahwa kebijakan yang baik tidak hanya bergantung pada kepatuhan tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang berkembang, sehingga diperlukan peningkatan fleksibilitas regulasi agar implementasi *E-katalog* lebih efektif dan inklusif.

Secara keseluruhan, implementasi *E-katalog* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Batu telah berjalan dengan tingkat kepatuhan yang cukup baik berkat pengawasan yang ketat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal responsivitas, terutama bagi UMKM kecil yang membutuhkan lebih banyak bimbingan dan penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel. Dengan meningkatkan pendampingan dan menyesuaikan kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM,

implementasi *E-katalog* dapat berjalan lebih efektif dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha di Kota Batu.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penjabaran di atas, maka simpulan penelitian:

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan): Implementasi *e-katalog* di Kota Batu membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses pasar bagi UMKM. Transformasi ini mengubah mekanisme transaksi dan pola kerja, meskipun masih menghadapi tantangan dalam adaptasi teknologi serta pemahaman regulasi oleh UMKM. Dampak utama yang dirasakan mencakup kemudahan akses pasar yang lebih luas, kepastian pembayaran yang lebih terjamin, dan peningkatan transparansi dalam proses pengadaan. Namun, agar manfaatnya optimal bagi seluruh UMKM, masih diperlukan pendampingan intensif.
2. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi): Keberhasilan implementasi *e-katalog* di Kota Batu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah, LKPP, penyedia jasa, dan UMKM, serta faktor institusional yang ada. Dukungan pemerintah dan penyedia layanan cukup kuat, tetapi masih terdapat tantangan dalam kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kompleksitas administratif. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah dalam pengawasan dan regulasi, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan pemahaman digital UMKM, infrastruktur yang belum merata, serta prosedur administratif yang masih kompleks. Oleh karena itu, strategi pendampingan dan penyederhanaan prosedur menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan ini.

Saran

Saran penelitian ini, sebagai berikut:

1. CV Bias Cipta Estetika disarankan mengembangkan program pendampingan UMKM yang lebih intensif dan berkelanjutan, mencakup pelatihan teknis, regulasi, dan administrasi digital untuk mengatasi kesenjangan pemahaman digital.
2. UMKM disarankan lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan digital melalui pelatihan dan jejaring dengan UMKM lain yang telah sukses menggunakan *e-katalog*.
3. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif implementasi *e-katalog* di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor keberhasilan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta.
- Anderson, E. (2011). Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony1. *Episteme*, 8(2), 144-164.
- Arifin, Z. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 54-63.
- Ati Nurul, U. (2021). Deliberatif Aktor Dalam Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dolly di Kota Surabaya.
- Cahyanti, M. M., & Anjaningrum, W. D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 73-79.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damayanti, A. I. (2013). *Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi *E-katalog* Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1970-1981.
- Grindle, M. S. (2017). One Policy content and context in implementation. *Polifcs and policy implementafion in the Third World*, 3-34.
- Halawa, S. J., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Dinamika Perubahan Profesionalisme Pegawai sebagai Bentuk Adaptasi Sistem Kerja Baru di Tempat Usaha di Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1525-1534.
- Hasibuan, R. P., & Amin, R. M. (2016). *Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Riau University).
- <https://tugumalang.id>. (2023, June 28). Pj Wali Kota Batu Minta OPD Kurangi Belanja Langsung, Lewat *E-katalog* Saja. Tugumalang.id. <https://tugumalang.id/pj-wali-kota-batu-minta-opd-kurangi-belanja-langsung-lewat-e-katalog-saja/>
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.

- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jennings, P., & Beaver, G. (1997). The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective. *International small business journal*, 15(2), 63-75.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, (2014): *Analisis Data Kualitatif*
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81-92.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2016. (2016). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96386/perda-kota-batu-no-1-tahun-2016>
- PERPRES No. 16 Tahun 2018. (2018). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- PERPRES No. 54 Tahun 2010. (2018). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41063/perpres-no-54-tahun-2010>
- Prikustiawan, A. (2023). Analisis Kebijakan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-katalog Lokal Untuk Pengembangan Umkm Di Pemerintah Kota Surabaya. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 177-184.
- RANDI, B. S. (2018). *Perbaikan Proses Layanan Resto Dengan Menggunakan Qfd (Quality Function Deployment) Dan Internal Benchmarking Pada Kober Mie Setan Gresik* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Sudaryono, D. (2015). *Pengantar Bisnis, Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A., Rahayu, Y. D., Winasis, M. A., & Murod, M. F. N. (2022). E-katalog dalam pemasaran barang/jasa pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19. *Journal of Community Development*, 2(2), 66-69.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Lp3es.
- Tunggal, A.W. (2004). *Manajemen strategik*, Jakarta: Havarindo.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wibowo, A. (2023, February 22). *malang-post.com - Wali Kota Batu: Produk UMKM Kota Batu Sudah Murah, Tak Ada Bentuk, Tak Laku Pula*. Malang-Post.com. <https://malang-post.com/2023/02/22/wali-kota-batu-produk-umkm-kota-batu-sudah-murah-tak-ada-bentuk-tak-laku-pula/>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).